Ibuisme Masa Kini:
Suatu Etnografi tentang Posyandu dan Ibu Rumah Tangga

M. Arief Wicaksono
Universitas Indonesia
ariefwicaksono.m@gmail.com

Abstract

"Housewife" is often an issues and concepts essential to studies the relationship between the state and society at the micro level. Through the women in the villages of cities, the "face" of state trying to be presented continuously in everyday life, one of them in public health system through Posyandu (Pos Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Terpadu). Posyandu put women, especially housewifes, as the 'spearhead' for realizing a healthy society, both in terms of physical and everyday behavior. The housewife is not only a target of health programs, but also as the person running the program, called Kader Posyandu. Each month the cadre pf Posyandu should attend the meetings, held events medical examinations for infants and the elderly, health counseling, surveys to homes, and making health data in the village, which of course it is all done in tandem with their role as housewifes and partly again also has another job outside the home. This study illustrates how the state wants to stick around to be present at the local level people today, especially in health programs through the perspective housewife-Posyandu cadres who are willing to work for the country. This study also wanted to answer the question, what is the reason for the housewifes so that it would work for the state in the present context. Observation and in-depth interviews with the cadres Posyandu conducted to answer the research questions above. Many of them on behalf of volunteerism in running this program, through this article we will know how the state can instill a sense of volunteerism so that the ideals of a healthy society can be realized through the role of women, especially housewifes.

Keywords – housewife, women, Posyandu, state

Abstrak

"Ibu rumah tangga" seringkali menjadi isu dan konsep penting dalam mengkaji relasi antara negara dan masyarakat di tingkat mikro. Melalui kaum perempuan di kampung-perkotaan, "wajah" negara berusaha dihadirkan terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam hal kesehatan melalui Posyandu (Pos Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Terpadu). Posyandu meletakkan kaum perempuan, khususnya ibu rumah tangga, sebagai ujung tombak untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, baik dari segi fisik maupun perilaku sehari-hari. Para ibu rumah tangga tersebut tidak hanya sebagai sasaran program-program kesehatan, tetapi juga sebagai orang yang menjalankan program, yang selanjutnya disebut *Kader Posyandu*. Setiap bulan para kader harus menghadiri rapat-rapat, menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan untuk balita dan lansia, penyuluhan kesehatan, survei ke rumah-rumah, dan membuat data kesehatan di kampungnya, yang tentunya itu semua dilakukan beriringan dengan peran mereka sebagai ibu rumah tangga dan sebagian lagi juga memiliki pekerjaan lain di luar rumah. Penelitian ini ingin menggambarkan bagaimana negara tetap bertahan untuk hadir di masyarakat tingkat lokal pada masa kini khususnya dalam program kesehatan melalui perspektif ibu rumah tangga-kader Posyandu-yang rela bekerja untuk negara tersebut. Penelitian ini juga ingin menjawab pertanyaan, apa yang menjadi alasan bagi ibu-ibu rumah tersebut sehingga mau bekerja untuk negara dalam konteks masa kini. Observasi dan wawancara mendalam dengan para kader

posyandu dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas. Banyak diantara mereka mengatasnamakan kesukarelaan dalam menjalankan program ini, melalui artikel ini kita akan tahu bagaimana negara dapat menanamkan rasa kesukarelaan tersebut sehingga cita-cita masyarakat sehat dapat terwujud dengan baik melalui peran kaum perempuan, khususnya ibu rumah tangga.

Kata Kunci: *ibu rumah tangga, perempuan, Posyandu, negara.*

PENDAHULUAN

"Inspirasi" datangnya topik ini berasal dari pengalaman pribadi yang pada awalnya mungkin terkesan subjektif, namun memiliki isu konseptual. Suatu pagi di rumah, ketika masa libur kuliah semester genap, dan adik saya yang SMP akan berangkat sekolah, ibu saya bangun pagi-pagi untuk memasak sarapan (hanya) untuk adik saya. Itupun dengan terburu-buru. Sesaat setelah adik saya sarapan dan berangkat ke sekolah, ibu saya langsung meninggalkan dapur. Bukannya berbelanja bahan makanan seperti pagi-pagi biasanya, justru dia mengambil setumpukan map berisi laporan-laporan kegiatan Posyandu. Hari itu, setumpuk laporan yang belum selesai itu harus segera dibereskan, tentunya bersama teman-teman sesama kader Posyandu. Kira-kira mendekati jam 12 siang, ibu saya baru pulang ke rumah.

Meminjam pemikiran Victor Turner, mungkin bagi ibu saya itu adalah sesuatu hal yang termasuk life as lived, sedangkan bagi saya hal itu adalah life as experience (Turner, 1986). Bagi ibu saya, rutinitasnya terkait dengan Posyandu adalah sebuah realitas biasa dalam sehari-hari, namun saya memberikan signifikansi pada hal tersebut. Sebuah konsep yang juga menjadi entry point awal dalam menentukan topik ini adalah konsep ibuisme yang ditawarkan oleh Madelon Djajadiningrat-Nieuwenhuis (1987) yang kemudian dilanjutkan oleh Julia Suryakusuma (1991) untuk menjelaskan secara deskriptif dan analitis mengenai "pengorbanan diri" perempuan untuk negara yang nirimbalan pada masa pemerintahan orde baru. Tentu saya tidak akan mengulangi pengunaan konsep di atas dengan sama dan lapangan penelitian yang berbeda. Justru dengan menggunakan paradigma prosesual saya ingin melihat bagaimana dinamika dari ibuisme ini di konteks masa kini, masa setelah kurang lebih 18 tahun pascaordebaru.

Penelitian dan makalah singkat yang saya lakukan ini setidaknya akan membahas dua hal. Pertama bagaimana negara tetap dapat menghadirkan dirinya di tingkat masyarakat level mikro, yaitu di kampung-kampung perkotaan, dalam hal mewujudkan masyarakat yang sehat dari segi fisik dan kebiasaan sehari-hari di masa kini. Kedua, apa yang melandasi kaum ibu-ibu untuk mau membantu dan bekerja demi negara untuk mewujudkan masyarakatnya sendiri yang sehat. Kedua pertanyaan ini secara terbatas hanya mampu saya hadirkan dari perspektif kaum perempuan yang juga merupakan kader Posyandu.

PKK: an Exit Point, Posyandu: an Entry Point

Satu penelitian apik yang banyak membantu saya dalam memperkaya dan mempertajam konsep serta metodologi adalah penelitian Jannice Newberry tentang relasi antara perempuan, negara, rumah tangga, dan kampung di keluarga Jawa. Penelitian ini dilakukannya pada 1992 di sebuah kampung

di Yogyakarta, yang kemudian pada 2006 hasil penelitiannya diterbitkan dalam Back Door Java: State Formation and The Domestic in Working Class Java. Penelitian Newberry yang tentunya didahului (salah satunya) oleh Suryakusuma penting untuk melihat dinamikanya pada masa kini.

Newberry berusaha untuk memahami di titik mana kategori keluarga berakhir dan kategori rumah tangga dimulai dan saat mana negara dinilai hadir melakukan intervensi. Keluarga seakan menjadi suatu arena tersendiri bagi negara untuk hadir secara interventif satu level di bawah masyarakat. Penetrasi program pemerintah dan ideologi yang diproduksi oleh negara ke dalam kesadaran wagra negara di komunitas kampung, yang tipikal di perkotaan Indonesia, dapat dimungkinkan berkat keberadaan keluarga (Warouw, 2013). Penetrasi program pemerintah ke dalam masyarakat melalui keluarga dan rumah tangga lebih diperkuat dengan adanya peran kaum perempuan, khususnya para ibu rumah tangga. Inilah yang juga disebutkan oleh Warouw, bahwa keluarga dalam fungsi seperti ini telah mendomestikasi sekaligus juga menegaskan otonomi kaum perempuan secara sosial-politik. Ini menjelaskan mengapa negara berkepentingan untuk mengatur kaum perempuan.

Rezim orde baru memberikan dimensi waktu tersendiri untuk melihat bagaimana masif (dan efektifnya) rezim dalam mengatur perempuan, khususnya melalui Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Tugu-tugu PKK yang berisi paparan sepuluh program pokok PKK[1] hampir selalu dapat dilihat di setiap muka gang-gang di perkampungan. Suryakusuma mencatat soal penempatan diskursus penghayatan dan pengamalan Pancasila ke dalam urutan pertama dari sepuluh program pokok PKK. Dengan demikian, PKK hadir atas nama negara. Selanjutnya, sebagai puncak restu negara terhadap PKK adalah dimasukkannya PKK ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada 1983 (Suryakusuma, 1991).

PKK, yang menurut banyak kalangan lahir dari semangat perjuangan kemerdekaan, terutama dalam konteks pergerakan perempuan, pada masa orde baru telah berubah menjadi sebuah organisasi masyarakat di bawah pemerintah nasional (Branson dan Miller, 1988; Gerke, 1992; Wierenga, 1993). Semua perempuan yang sudah menikah, selanjutnya dipandang sebagai perempuan dewasa. Semua perempuan dewasa secara otomatis merupakan bagian dari PKK, baik sebagai pengurus maupun anggota. Hal tersebut akhirnya berimplikasi munculnya sebuah kategori baru dalam bidang sosial yang didukung oleh negara, yakni ibu rumah tangga, dan pengerahan kaum perempuan Indonesia, khususnya kaum perempuan dari kelas bawah, sebagai pekerja kesejahteraan sosial yang **tidak dibayar** (Newberry, 2013:8).

Kegiatan PKK yang bersifat menyeluruh itu, salah satu yang terkenal adalah kegiatan Posyandu (Pos Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Terpadu). Banyak kalangan, termasuk Newberry, melihat Posyandu sebagai agenda satu kali sebulan untuk memberikan vitamin kepada anak-anak yang berusia di bawah lima tahun, namun, Posyandu sejatinya lebih kompleks dari kekadar itu. Bersama-sama dengan program koperasi PKK, Posyandu merupakan salah satu yang tergolong cukup sukses bertahan hingga saat ini. Posyandu adalah suatu "institusi" pelayanan kesehatan yang paling mikro dan paling dekat dengan masyarakat. Posyandu diorganisasikan oleh masing-masing kelurahan dan dijalankan oleh masing-masing RW (Rukun Warga).

[1] 1) Penghayatan dan pengamalan Pancasila, 2) gotong royong, 3) pangan, 4) sandang, 5) perumahan dan tata laksana, 6) pendidikan dan ketrampilan, 7) kesehatan, 8) pengembangan kehidupan berkoperasi, 9) kelestarian lingkungan hidup, dan 10) perencanaan kesehatan

Masing-masing RW memiliki jumlah Posyandu yang berbeda-beda, tergantung dari jumlah penduduk di kampung tersebut. Satu kegiatan terkenal dari Posyandu adalah yang disampaikan oleh Newberry.

Ke Posyandu dibawa semua anak berusia di bawah lima tahun untuk ditimbang dan diberi vitamin serta makanan atau susu gratis. Vitamin serta asupan gizi yang gratis itu merupakan simbolis saja sifatnya karena jumlahnya yang sedikit (satu anak hanya mendapat satu hingga dua bungkus kecil susu bubuk dan sereal) dan hanya diadakan satu kali selama sebulan. Namun demikian, menimbang anak setiap bulan memiliki arti tersendiri bagi kaum ibu-ibu karena ada catatan yang menunjukkan apakah berat badan anak naik atau turun. (Newberry, 2013:9). Di dalam PKK, Posyandu merupakan salah satu dari banyak program kerja. PKK sendiri membentuk kelompok kerja khusus untuk urusan Posyandu ini. Program Posyandu lain yang tekrenal adalah program penyuluhan kesehatan, pendidikan kebiasaan hidup bersih dan sehat (PHBS), pencegahan penyakit tertentu, khususnya yang paling terkenal adalah diare dan demam berdarah, serta satu yang paling masif di masa orde baru adalah program Posyandu untuk menggencarkan program nasional Keluarga Berencana (KB).

Satu isu yang sangat penting selanjutnya adalah mengenai kesukarelaan. Studi-studi mengenai ibuisme dan "penyelenggaraan negara" di tinngkat lokal oleh kaum perempuan khususnya ibu rumah tangga di masa lalu, atau setidaknya sejak penghujung abad 20 adalah sifatnya yang tanpa imbalan atau sukarela. Hal ini dikonfirmasi oleh Madelon Djajadiningrat-Nieuwenhuis yang pertama kali mengenalkan istilah ibusime untuk merelasikan kombinasi antara tata nilai kaum priyayi elite dengan tata nilai kaum petite-bourgeois Belanda untuk membentuk ideologi yang mendukung setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang ibu dalam keluarga, kelas, atau negara tanpa mengharapkan imbalan (Nieuwenhuis, 1987:44). Konsep ibuisme negara kemudian dilanjutkan oleh Suryakusuma (1991) untuk menjelaskan peran pemerintah Orde Baru dalam memperkenalkan pengorbanan diri kaum perempuan untuk tujuan-tujuan mereka sendiri.

Hasil kinerja kaum perempuan ibu rumah tangga dalam mewujudkan masyarakat sehat, misalkan secara spesifik adalah dalam persoalan perwujudan program Keluarga Berencana, adalah satu program nasional yang tergolong sangat sukses jika dikaitkan dengan menurunnya angka kematian bayi pada masa itu dan terkait dengan pengendalian jumlah penduduk. Nilai-nilai ideal bagi perempuan di kampung dengan sangat berhasil dapat dikonstruksi dengan baik dan dilanggengkan secara terus-menerus, setidaknya hingga Orde Baru tumbang pada 1998, tapi masih terasa hingga kurang lebih 10 tahun setelah itu. Isu kesukarelaan dan nirimbalan pada masa lalu tersebut ingin saya bawa pada masa kini. Artinya, apakah kaum perempuan dan ibu rumah tangga khususnya masih bertumpu pada kesukarelaan dan tanpa imbalan dalam "membantu" negara menghadirkan dirinya di masyarakat level mikro. Sebab satu isu yang dari dahulu tidak dapat dinafikan khususnya dalam disiplin sosialbudaya adalah paradigma materialis. Materi menjadi konsep penting yang sedikit-banyak selalu mempengaruhi fenomena kebudayaan. Isu materi kemudian menjadi menguat di abad ke-21 ini ketika ekonomi seakan-akan menjadi panglima dalam setiap pembahasan. Ekonomi mengkonstruksi dunia, dengan kata lain, ekonomi mengkonstruksi kebudayaan.

Ibu rumah tangga yang juga merupakan kader Posyandu tentunya dalam keseharian mereka tidak hanya berkesibukan dalam Posyandu semata. Dia juga merupakan ibu rumah tangga yang setidaknya memiliki lima peran domestik: 1) pembantu dan pendukung setia suami, 2) pengurus rumah

tangga, 3) penghasil generasi masa depan, 4) pelaku sosialisasi utama keluarga, dan 5) warga negara Indonesia (terjemahan dari N. Sullivan 1983:2). Di Posyandu sendiri, kesibukan yang dialami bukan hanya satu kali dalam sebulan seperti yang saya uraikan singkat di beberapa paragraf sebelumnya. Selain banyaknya kegiatan Posyandu tersebut, negara juga meminta pertanggungjawaban kaum perempuan sebagai representasi dari dirinya dalam masyarakat di level mikro. Pertanggungjawaban itu berupa laporan dan data-data kesehatan yang harus dibuat setiap bulannya. Laporan sangat kompleks sifatnya sebab meliputi seluruh unsur dan aspek kesehatan masyarakat. Laporan yang banyak tersebut harus dikerjakan oleh sedikitnya dua hingga tiga orang kader setiap Posyandu dan kemudian diteruskan ke pemerintah kelurahan untuk selanjutnya diserahkan pada dinas kesehatan kabupaten atau kota masing-masing. Bisa dibayangkan bahwa semua kesibukan sebagai ibu keluarga, ibu rumah tangga, istri, dan kader Posyandu harus dilakukan secara bersama-sama, salah satu buktinya adalah contoh yang saya kemukakan di awal pendahuluan ini. Baik PKK maupun Posyandu harus sama-sama kita lihat sebagai upaya kepanjangan tangan negara untuk dapat hadir secara terus-menerus di masyarakat. Namun demikian kita perlu tahu juga bagaimana dinamikanya di antara para pelaksana kepanjangan tersebut.

METODE

Metode penelitian yang saya lakukan adalah kualitatif-etnografis. Metode etnografik dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan selanjutnya menjelaskan secara analitik suatu gejala atau fenomena di sebuah lapangan penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang subjek penelitian saya, relasi dan kehidupan antarmereka, serta pandangan mengenai kehidupannya. Penggunaan metode etnografi bertujuan untuk menggali, memahami, mengidentifikasi, men-deskripsikan, memetakan, dan menganalisis bagaimana Posyandu sebagai suatu "institusi" dapat terselenggara di masyarakat level mikro tentunya dengan dimotori oleh kaum perempuan pada umumnya dan ibu rumah tangga pada khususnya.

Dalam konteks penggunaan metode etnografi, pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Posyandu, yaitu kegiatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan bayi di bawah usia lima tahun serta pendataan dan pembuatan laporan kesehatan yang dilakukan oleh para kader Posyandu. Pengumpulan data berupa dokumen-dokumen contoh laporan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Posyandu juga dilakukan. Selain itu saya juga melakukan wawancara mendalam dan diskusi dengan sejumlah kader Posyandu dan satu orang bidan dari Puskesmas[2].

Lokasi penelitian saya, baik ketika melakukan pengamatan maupun melakukan wawancara mendalam adalah di RW 02 Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. RW ini memiliki tiga Posyandu, dan satu fokus penelitian saya adalah berada di satu Posyandu yang tentunya representatif. Di kelurahan Ciptomulyo, Kota Malang tersebut terdapat satu buah Puskesmas dan 17 Posyandu. Rata-rata setiap RW memiliki 3 Posyandu. Posyandu tempat saya meneliti bernama Posyandu Anggrek 02. Sementara itu, wawancara saya lakukan bersama dengan ketua paguyuban Posyandu kelurahan, ketua Posyandu Anggrek 2, dua orang kader Posyandu, dan satu bidan Puskesmas yang

[2] Puskesmas, kependekan dari Pusat Kesehatan Masyarakat, yaitu organisasi pelayanan kesehatan di tingkat kelurahan, satu tingkat di atas Posyandu. Puskesmas bertanggung jawab langsung kepada Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten. Dalam hal ini, Puskesmas memiliki fungsi pembinaan dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Posyandu

kerap membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan Posyandu Anggrek 2. Semua orang yang saya wawancara tersebut juga tak lain merupakan ibu rumah tangga, dan beberapa diantaranya memiliki pekerjaan lain di luar rumah tangga dan kesibukan Posyandu-nya. Tentunya sebelum melakukan wawancara, saya telah merancang susunan pertanyaan terbuka. Beberapa informan sengaja juga saya lakukan wawancara secara bersama-sama, hal ini saya maksudkan untuk check and re-check, bahwa informasi satu informan dengan informan lainnya tidak kontradiktif. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun dalam pelaksanaannya dapat berkembang.

Teknik analisis data yang saya gunakan adalah menggunakan teknik analisis data kualitatif. Data-data dari haisl pengamatan langsung dan wawancara mendalam saya kumpulkan dan saya petakan kemudian saya analisis secara kualitatif berdasarkan pada pedoman kerangka konseptual untuk mendapat gambaran yang deskriptif dan analitik dari fenomena yang sedang saya teliti. Oleh karena itu, fokus analisis kualitatif bersifat khas karena sesuai dengan konteks lapangan masing-masing. Di sisi lain, analisis data juga saya lakukan bersamaan dnegan pengumpulan data itu sendiri, terutama saat wawancara. Silang pendapat antarinforman dan informasi "non-visual" juga menjadi bagian tersendiri dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu kegiatan Posyandu yang paling terkenal dan paling disadari oleh masyarakat adalah kegiatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan anak balita (bayi di bawah usia lima tahun). Meskipun Posyandu berarti keseluruhan dan kompleksitas kegiatan sistem kesehatan masyarakat yang bukan hanya kegiatan pelayanan kesehatan tersebut, istilah "Posyandu" di masyarakat berarti cenderung merujuk kegiatan yang satu itu. Di Posyandu Anggrek 2, kegiatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan lansia diadakan setiap hari Selasa pada minggu pertama setiap bulannya. Kegiatan ini dimulai pukul 08.00 pagi hingga kurang lebih pukul 11.00 siang serta bertempat di halaman salah seorang warga yang cukup luas. Pelayanan kesehatan ini diorganisir oleh lima orang kader, mulai dari persiapan logistik seperti bangku dan meja, alat penimbangan, hingga logistik konsumsi.

Dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kegiatan dilakukan, para kader tersebut mengingatkan melalui depan rumah-rumah warga dengan berteriak cukup kencang, bahwa ada kegiatan Posyandu. Hal ini disebabkan dua hal, pertama memang untuk mengingatkan para ibu-ibu rumah tangga agar membawa anaknya yang berusia lima tahun atau kurang pergi ke Posyandu, kedua, memang ada beberapa ibu rumah tangga yang enggan membawa anaknya ke Posyandu. Khusus untuk ibu-ibu yang enggan membawa ke Posyandu tersebut, alasannya adalah karena mereka bekerja dan lebih mementingkan urusan rumah tangga, seperti memasak, mencuci baju, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Walaupun hanya satu hingga tiga orang yang tidak membawa anaknya ke Posyandu, namun implikasi yang cukup merepotkan dialami oleh para kader Posyandu. Pembahasan mengenai hal ini akan disampaikan di paragraf-pargraf berikutnya.

Pukul 08.00 tepat, biasanya masih sedikit ibu-ibu yang sudah datang di lokasi kegiatan. Ada lima meja yang berarti lima urutan bagi ibu-ibu untuk mendapat pelayanan kesehatan. Meja pertama adalah registrasi atau pengisian daftar hadir. Meja kedua adalah meja penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan balita. Ada dua jenis alat timbangan, yaitu timbangan gantung dan timbangan duduk, tergantung dengan ukuran balita. Meja ketiga adalah meja pencatatan ukuran badan. Di sini

Volume 1 (2) Desember 2016 eISSN 2528-1569 pISSN 2528-2115

terdapat catatan dari bulan-bulan sebelumnya sehingga ibu dapat melihat perkembangan berat badan dan tinggi badan anaknya.

Jika tidak bertambah atau malah menurun, maka balita tersebut akan mendapat catatan tersendiri dan biasanya akan mendapat asupan tambahan. Di meja empatlah asupan tambahan diberikan. Di meja empat ini, ada susu untuk balita dan ibu hamil dan biskuit sereal. Setiap tiga bulan sekal ibu-ibu dan balita mereka juga akan mendapatkan makanan lain ketika Posyandu mereka ada jadwal memasak[3]. Di meja lima, adalah meja untuk konsultasi tentang kesehatan. Di sini, terdapat satu orang bidan dari Puskesmas yang akan melayani konsultasi. Selain melayani konsultasi, bidan dari Puskesmas terkadang (saat pada jadwalnya) juga melakukan penyuluhan kesehatan (misalkan penggunaan daun kelor untuk obat, pencegahan demam berdarah, dan lain sebagainya). Bidan dari Puskesmas juga membawa obat-obatan dan vitamin, terkadang juga membawa vaksin untuk imunisasi.

Lima kader, laki-laki dan lansia: Suatu krisis ketenagaan

Posyandu Anggrek 2 sebenarnya memiliki enam orang kader. Namun karena satu orang kader harus ikut suaminya tinggal di luar kelurahan, maka kader tersebut harus meninggalkan perannya di Posyandu. Dari lima kader yang tersisa, tiga diantaranya merupakan lansia dan satu diantaranya adalah laki-laki. Bagaimana bisa? Saya tidak ingin membahasnya dalam konteks gender, tetapi fenomena adanya satu orang kader laki-laki merupakan bukti dan indikasi dari apa yang juga disampaikan oleh kader-kader Posyandu lainnya: kurangnya orang. Bu Saripah (63) merupakan ketua kader Posyandu Anggrek 2. Dirinya sudah 20 tahun menjadi bagian dari Posyandu. Awalnya Bu Saripah adalah anggota Posyandu, baru sejak tahun 2011 dirinya menjadi ketua. Ketika ditanya mengapa masih aktif di Posyandu, pengakuannya tak lain adalah karena sulit mencari kader pengganti. Berbeda dengan masa lalu, dimana *state ibuism* sangat kental, bahkan ibu lurah (istri kepala kelurahan) bersama dengan ibu RW (istri ketua RW) turun dan memantau langsung pelaksanaan Posyandu. Tidak pernah ada kekosongan dan kekurangan kader karena Ibu RW sangat dekat dengan masyarakatnya dan siap mencarikan kader pengganti jika ada salah satu kader berhalangan. Namun sekarang, rezim pengaturan perempuan tidak terlalu mengatur seperti masa lalu. Ibu RW di RW 02 terkesan tidak aktif dan tidak pernah terlibat dalam acara-acara yang diselenggarakan di RW, seperti arisan, koperasi, dan tentunya Posyandu.

Kini, ideologi *state ibuism* tampak memasuki titik nadirnya. Artinya, negara harus berupaya dua kali lebih efektif untuk terus hadir secara terus-menerus di masyarakat level mikro, di lorong-lorong kampung. Beberapa alasan sulitnya mencari kader pengganti adalah pengetahuan warga, khususnya kaum perempuan dan ibu rumah tangga, tentang administrasi kesehatan cukup rendah. Para ibu-ibu rumah tangga mengaku bisa jika diminta untuk menimbang berat badan, namun menjadikannya itu semua ke dalam laporan yang sistematis merupakan kendala tersendiri. Gejala melunturnya *state ibuism* tidak hanya melanda dalam fenomena sulitnya mencari kader Posyandu, tetapi juga dapat dilihat dari ibu-ibu rumah tangga yang enggan membawa balitanya ke Posyandu. Hal ini sungguh kontradiktif jika dicerminkan dengan nilai-nilai ideal seorang ibu rumah tangga di masa lalu (khususnya

[3] Setiap tiga bulan sekali, selain mendapat sereal dan susu, ibu dan balita yang hadir di kegiatan pelayanan kesehatan juga mendapat makanan berat, yaitu makanan bernasi, biasanya adalah sup sayur. Kegiatan memasak dikoordinasikan oleh ibu-ibu di tingkat RT, dipimpin oleh ibu RT, istri ketua RT.

dalam konteks di Jawa), yang salah satunya adalah untuk menghasilkan generasi masa depan bangsa yang sehat dan cerdas. Para suami cenderung tidak (bahkan sangat tidak) terlibat dalam kesibukan Posyandu. Mereka juga tidak pernah (menurut pengakuan ibu rumah tangga) menanyakan apakah berat badan anaknya naik atau turun, bahkan diantara mereka juga tidak pernah tahu kapan jadwal kegiatan pelayanan kesehatan dari Posyandu diberikan.

Solusinya, adalah mengandalkan kedekatan organik yang berbasis pada kekerabatan. Ibu Saripah yang sudah cukup lansia dan bahkan kakinya terlalu sakit jika harus berjalan jauh, terutama jika harus berjalan ke kantor kelurahan yang jaraknya cukup jauh dari kampung, meminta anaknya, Dwi Lestari (30) untuk menjadi kader Posyandu bersama dirinya.

> Hubungan pertalian darah, yang terkait dengan tempat tinggal bersama, jauh lebih penting dalam susunan kehidupan sosial (Gibson: 1995:129).

Dwi memiliki satu orang anak berusia 2,5 tahun dan merupakan karyawan di sebuah toko grosir pakaian. Dirinya mengaku sering izin untuk tidak atau terlambat masuk toko karena alasan kesibukan Posyandu. Setiap bulan, juga ada rapat rutin yang dilaksanakan setiap hari Kamis minggu terakhir pada pagi hari. Rapat ini adalah rapat koordinasi dan evaluasi yang dipimpin langsung oleh pihak kelurahan. Koordinasi yang bersifat administratif ini kemudian melahirkan struktur administratif yang menentukan garis-garis koordinasi "maya" antara masyarakat dan tata pemerintahan tingkat lokal. Namun jika ditarik lebih panjang ke atas, garis-garis ini menjadi nyata dalam konteks hubungan administratif antara pemerintah lokal (kelurahan) dan pemerintah kota atau kabupaten.

Kelompok-kelompok masyarakat yang bertetangga dibentuk dan dibuat untuk saling kerja sama dan mengawasi. Seorang ibu yang tidak membawa balitanya ke Posyandu akan ditegur oleh ibu lain yang membawa balitanya ke Posyandu. Di masa lalu, idealnya seorang ibu yang mendapat teguran tersebut umumnya merasa punya cap bukan ibu ideal, namun kini, ibu-ibu yang tidak membawa balitanya ke Posyandu merasa cuek saja dan yang mengingatkan mereka bukan ibu-ibu tetangganya sendiri, melainkan kader Posyandu. Artinya kedekatan organik antaribu rumah tangga untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang ideal, setidaknya dalam hal kesehatan, pada masa kini sudah menemui titik lunturnya. Masyarakat pedesaan-perkampungan ideal "abad berapa pun sekarang sekarang selalu tampak telah pudar atau sedang dalam proses memudar" (Roseberry, 1989:57).

Dari SK ke Insentif, dari Data ke Lomba

Tampaknya untuk terus menghadirkan dirinya di masyarakat, negara tidak harus menghadirkan dirinya di tengah-tengah mereka, atau dengan kata lain, negara tidak perlu mendatangkan para aparat kesehatan resmi di dinas kesehatan untuk turun ke kelurahan-kelurahan. Yang dilakukan negara untuk menghadirkan dirinya adalah dengan menjadikan beberapa orang dari masyarakat itu sendiri sebagai negara. Karena menyadari pentingnya peranan kaum perempuan dan ibu rumah tangga untuk menjadi kader Posyandu yang terus mereproduksi masyarakat sehat, negara meneguhkan keberadaan mereka, dengan kata lain, mengakui posisi mereka secara resmi di struktur negara. Oleh karena itu, melalui pemerintah kota dengan dikoordinasikan oleh dinas kesehatan, para kader Posyandu tersebut diteguhkan posisinya atau diresmikan peranannya dengan diberikan surat keputusan (SK) pengangkatan resmi yang ditandatangani langsung oleh walikota. Adanya surat keputusan pengangkatan ini dilakukan

pemerintah kota Malang dan diterima para kader Posyandu Anggrek 2 dan juga tentunya kader Posyandu lain sejak tahun 2015.

Di kelurahan Ciptomulyo, terdapat 141 kader Posyandu yang secara resmi diberikan SK oleh negara. Artinya, 141 orang tersebut telah memiliki peran yang lebih dari ganda, mereka sebagai kader Posyandu, sebagai "negara", dan sebagai masyarakat itu sendiri. Para kader Posyandu yang memiliki SK tersebut sangat senang saat mereka harus menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh instansi yang lebih tinggi, biasanya diselenggarakan oleh pemerintah kota. Di sana, seluruh kader Posyandu se-kota berkumpul dan itulah yang disebut paguyuban kader Posyandu kota. Para ibu rumah tangga tersebut, di luar konteks peranannya sebagai kader Posyandu, dapat memperluas jaringan mereka.

Melalui peresmian peranan kaum perempuan, hal ini menunjukkan bahwa perempuan dilihat sebagai perantara antara dunia adat (nilai-nilai kemasyarakatan) dengan nilai-nilai ideologi negara, seperti misalnya nilai-nilai yang menggalakkan peranan ibu rumah tangga untuk terus menjadikan keluarganya sebagai keluarga yang ideal menurut niali-nilai yang telah ditetapkan oleh negara. Penempatan perempuan seperti itu, sebenarnya secara makro, menempatkan mereka dalam posisi simbolik dan praktis yang besar. Bayangkan, tanpa harus hadir di tengah-tengah masyarakat, melalui para ibu rumah tangga-kader Posyandu tersebut, negara sudah tidak perlu lagi memusingkan masalah ancaman kematian bayi. Di tangan ibu rumah tangga itulah, masalah itu sudah dapat ditangani.

Menjadikan ibu rumah tangga sebagai "instrumen" negara untuk memasyarakatkan ideologinya secara resmi (bukan secara sukarela seperti yang terjadi pada masa orde baru), berarti memiliki implikasi materialis dari sisi para kader. Ada sebabnya mengapa SK yang diberikan kepada kader Posyandu menjadi sesuatu yang berharga bagi ibu rumah tangga-kader Posyandu tersebut. Hal ini tak lain dan tak bukan karena berhubungan dengan insentif yang diterima oleh para kader Posyandu. Insentif ini diberikan setiap bulan. Bu Jumakyah (52) dan bu Dwi Lestari (30) mengaku mendapat Rp. 95.000,- setiap bulannya dari pemerintah sebagai insentif dan "uang lelah" atas pengabdian mereka pada negara dalam Posyandu. Jumlah tersebut walaupun tidak banyak dan terkesan simbolik saja, namun bagi ibu rumah tangga kelas menengah, seperti yang banyak terdapat di lokasi penelitian saya, merupakan sesuatu yang berarti. Hal ini dibenarkan oleh Bu Siti Aminah (53), ketua paguyuban Posyandu se-kelurahan, bahwa sejak adanya keputusan pemerintah kota memberikan surat keputusan pengangkatan kader Posyandu sebagai "kader negara", banyak ibu rumah tangga yang tergiur untuk mau menjadi kader Posyandu, namun permasalahannya tidak berhenti sampai di situ. Para ibu rumah tangga yang tergiur tersebut, hanya tergiur karena alasan SK dan insentif semata, namun secara kinerja, mereka tidak dapat dikatakan baik, bahkan buruk. "banyak yang ingin menjadi kader Posyandu, tapi tidak ada niat sama sekali. Banyak dari mereka yang sudah diterima menjadi kader, dan mendapat SK, setelah tahu bahwa tugasnya cukup banyak, mereka keluar, dan kami pun (kader Posyandu lainnya), kerepotan mencari pengganti.", kata bu Siti Aminah.

Pertemuan kader 'resmi' Posyandu yang diadakan dua sampai tiga bulan sekali di tingkat kota, menjadi yang ditunggu-tunggu oleh para kader Posyandu. Pertemuan tersebut biasanya dilakukan di gedung-gedung pertemuan yang cukup elite. Para ibu rumah tangga juga menggemari yang berbau "priyayi-priyayi", bersalaman dan bertemu dengan istri wali kota sebagai ketua penggerak utama PKK, bagi mereka adalah kebanggaan tersendiri. Di dalam dimensi

Volume 1 (2) Desember 2016 eISSN 2528-1569 pISSN 2528-2115

inilah, ibuisme seakan menguat lagi, namun perlu diingat, hanya secara terbatas sifatnya, yaitu karena SK dan insentif. Pertemuan kader resmi Posyandu se-kota merupakan sarana sosialisasi dan pendidikan bagi mereka. Di sini, berbagai penyuluhan tentang kesehatan diselenggarakan, untuk selanjutnya mereka teruskan hingga ke masyarakat level mikro. Rumah menjadi area yang ideal bagi nilai-nilai negara dapat masuk, tentunya melalui ibu rumah tangga.

Pendidikan dan penyuluhan bagi para ibu rumah tangga-kader 'resmi' Posyandu itu pada akhirnya membutuhkan kekuatan rumah tangga, keluarga, dan kekuatan moral kaum perempuan sebagai landasan yang memperlancar bagi proyek-proyek politik yang lebih besar, penyuluhan dan pendidikan kaum perempuan untuk rumah tangga menjadi alasan bagi perluasan pekerjaan rumah tangga pribadi mereka hingga ke bidang pengelolaan secara rasional masyarakat umum (Newberry, 2013:174). Memang, peran perempuan di bidang rumah tangga, memberi mereka "hak dan kewajiban untuk terlibat dalam urusan-urusan masyarakat yang lebih luas" (Steinschneider 1994:13). Ibuisme yang seakan mampu menguat (dikuatkan) dengan SK dan insentif tersebut pada akhirnya kembali memudar ketika ternyata para ibu rumah tangga-kader Posyandu itu tahu bahwa Posyandu merupakan sesuatu yang kompleks yang merumitkan.

Tidak hanya berhenti pada SK dan insentif, satu upaya yang dilakukan oleh negara untuk memastikan agar roda mewujudkan masyarakat sehat dapat terus berputar adalah dengan mengadakan lomba-lomba. Salah satu kegiatan Posyandu yang paling rumit dan menyusahkan para ibu rumah tangga-kader Posyandu adalah membuat laporan bulanan mengenai data kesehatan di kampungnya. Jumlah laporan yang harus dibuat jumlahnya ada 31 buku. Laporan tersebut harus dikerjakan oleh dua hingga tiga orang kader, dan waktu pengerjaannya jelas memakan waktu yang tidak sedikit. Inilah mengapa di awal-awal tadi, saya mengatakan bahwa jika ada satu ibu rumah tangga saja yang tidak membawa balitanya ke Posyandu, maka berimplikasi ketiadaan catatan. Artinya, jika ada laporan yang kosong, maka akan mempengaruhi validitas laporan keseluruhan, dan ini jelas membuat citra suatu Posyandu menjadi diragukan.

Laporan-laporan yang banyak tersebut kompleks sifatnya, diantaranya adalah laporan perkembangan berat dan tinggi badan balita, laporan kesehatan ibu hamil, laporan kesehatan ibu hamil dan menyusui, laporan KB, laporan mengenai jentik nyamuk, laporan mengenai kondisi rumah sehat, dan masih banyak lagi. Dalam hal ini, negara hadir dalam bentuk kertas-kertas dan tabel-tabel. Mungkin, kita (dan saya pada awalnya) memandang bahwa kertas dan tabel yang banyak tersebut secara fetish, atau memandangnya begitu dan biasa saja, namun ternyata dibalik kertas dan tabel tersebut, sesungguhnya ada negara yang sedang memantau. Laporan-laporan itu dibuat oleh kader Posyandu, dan pada tenggat waktu tertentu pada setiap bulan, harus diserahkan kepada ketua kader Posyandu di tingkat RW dan kelurahan untuk akhirnya diperiksa. Jika ada kesalahan sedikit saja, maka harus diulang. Makanya dalam pengisian, para kader biasanya menggunakan pensil terlebih dahulu.

Laporan kesehatan kampung merupakan wujud pertanggungjawaban yang diberikan oleh kader Posyandu kepada negara yang telah memberikannya insentif. Di masa orde baru, laporan yang dibuat tidak sebanyak ini. Menjadi logis jika, negara pada akhirnya memberikan para kader Posyandu, walaupun sedikit, sejumlah insentif untuk mendapat laporan-laporan menegnai kondisi kesehatan kampungnya. Laporan-laporan itu setelah terhimpun seluruh kelurahan, setiap tahunnya diikutkan lomba. Lomba-lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah kota melalui dinas kesehatan kota memiliki

pretige tersendiri bagi para kader jika berhasil dimenangkan. Di satu sisi, laporan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban, di sisi lain, laporan dibuat untuk keperluan lomba. Lomba-lomba itu hanya simbolik sifatnya, tidak ada tindak lanjutnya, namun para kader selalu berlomba-lomba untuk memenangkan Posyandunya.

Dari Patron-klien ke Resiprositas

Perlu untuk kita melihat perbandingan bagaimana motif kaum perempuan (khususnya) bekerja di masa Orde Baru dan masa pascareformasi. Untuk itu, tulisan *Negara dalam Desa: Patronase Kepemimpinan Lokal* karya Hans Antlov perlu untuk disimak. Saya juga menyandingkannya dengan buku Saya Shiraishi, *Pahlawan-pahlawan Belia: Keluarga Indonesia dalam Politik* untuk memunculkan suasana "kesukarelaan" dalam masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, menggunakan pendekatan politik-kultural dari Weber, birokrasi dan tata pemerintahan di Indonesia dari tingkat naisonal hingga tingkat lokal diselimuti nuansa "kekeluargaan" patrimonial, dimana kedudukan dan tingkahlaku seluruh hirarki sebagian besar tergantung pada hubungan personal-kekeluargaan atau patron-klien. Hal ini kemudian memunculkan sebuah idiom bahwa pemerintahan Indonesia bersandar pada apa yang disebut sebagai "keluarga besar Indonesia", tentu dengan Soeharto sebagai bapak. Nuansa "kebapakan" ini kemudian diturunkan ke "bapak-bapak" lain yang secara hirarki berada di bawahnya, yaitu sampai pada tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan. Bapak camat, bapak lurah (karena memang lebih banyak bapak daripada ibu), tak lain merupakan representasi dari bapak di tingkat nasional (baca: Soeharto). Kontrol bapak-bapak ini kemudian masuk juga ke dunia ibu-ibu.

Jadi sebenarnya, sisi "kesukarelaan" ini pada tataran ibu-ibu sebagai kader ujung tombak Posyandu di masa lalu, memang dilandasi oleh rasa kesukarelaan yang sebenarnya. Namun demikian, yang lebih penting adalah perspektif kita melihat rasa "kesukarelaan" itu muncul. Bukan melihatnya dari diri ibu-ibu kader Posyandu, melainkan dari golongan yang secara hirarkis berada di atasnya, misalkan dari ibu lurah. Di dalam diri ibu lurah, tentu ada rasa tanggung jawab dan mungkin juga beban yang disandang dari suaminya sebagai bagian dari struktur pemerintahan dan juga struktur patron-klien. Tidak dapat dipungkiri bahwa di masa orde baru, "kesukarelaan" dimunculkan dengan latar belakang patron-klien dan kontrol negara (bapak nasional) kepada warga masyarakatnya melalui "bapak-bapak" di tingkat lokal.

Sedangkan di masa reformasi dan pascareformasi, terutama sejak maraknya otonomi daerah, kontrol semacam di masa Orde Baru tidak lagi kuat. "Bapak nasional" tidak lagi memegang peranan penting di tingkat lokal. Tata laksana pemerintahan pada masa sekarang ini lebih diperankan oleh praktisi pemerintahan daerah dan lokal, yaitu walikota atau bupati, camat, dan lurah. Semakin banyaknya camat dan lurah perempuan mungkin saja menjadi salah stau penyebabnya, namun lebih dari itu, memudarnya rasa "kesukarelaan" pada diri ibu-ibu kader Posyandu merupakan implikasi dari mengendurnya kontrol dan patron-klien nasional-lokal, setidaknya di sistem kesehatan masyarakat sehari-hari. Kontrol negara hanya berupa insentif dan SK kepada para kader Posyandu. Oleh karena itu muncul kesan bahwa semangat "kesukarelaan" yang pada masa Orde Baru dibangun dengan latar belakang kontrol negara dan patron-klien, pada masa kini lebih dibangun dengan latar belakang resiprositas. Bahwa karena negara sudah memberikan sejumlah uang kepada para kader, mereka merasa untuk wajib

Volume 1 (2) Desember 2016 eISSN 2528-1569 pISSN 2528-2115

mengembalikannya dengan mengerja-kan tugas-tugas mereka sebagai kader Posyandu.

Everyday State – Monthly State?

Setidaknya sejak masa orde baru, PKK dan Posyandu jelas menempatkan kaum perempuan khususnya ibu rumah tangga berada di garis depan dalam pembangunan Indonesia, khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Peranan mereka dalam masyarakat, pada konteks-konteks tertentu menjadi negara dan pemerintahan itu sendiri, yang menjadikan diri mereka sebagai kepanjangan dari program-program pemerintah yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui aktivitas formal dan informal kaum perempuan, dan untuk membantu menciptakan masyarakat kampung yang ideal. Secara signifikan, proses pembentukan negara sebagai proses penyebaran kekuasaan negara sehari-hari melalui bentuk-bentuk pemerintahan ini dapat terlaksana jika para kaum perempuan dan kader Posyandu itu menggunakan sumber daya negara untuk kepentingan dan tujuan mereka dan masyarakatnya. Everyday State yang saya maksud di sini adalah bagaimana negara terus mengadirkan dirinya di lorong-lorong kampung, tentunya di konteks masa kini.

Pada konteks masa lalu, *everyday state* tampak sangat intensif sebab negara secara efektif mampu membumikan secara masif nilai-nilai ideologinya, tentunya dengan cara rezim tersendiri. Secara bersamaan, negara pada waktu itu juga mampu mengolaborasikan nilai-nilai ideologi tersebut dengan nilai-nilai ideal masyarakat Jawa: gotong royong. Konsep gotong royong seakan menjadi instrumen yang sangat berguna untuk membuat masyarakat terus bekerja mewujudkan kondisi mereka sendiri yang sehat. Oleh karena itu, pada masa lalu negara cukup berlandaskan pada kesukarelaan kaum perempuan untuk bertugas atas nama mereka.

Menjadi problematis ketika 18 tahun pascaorde baru yang sangat dominan dan berorientasi pada pembangunan, ideologi pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat itu memudar. Masyarakat kini cenderung berpandangan bahwa pembangunan adalah dari dan oleh negara, untuk masyarakat. Ibu Saripah yang sudah puluhan tahun menjadi kader Posyandu dan inilah juga yang dikonfirmasi oleh Bu Kridiana (34), seorang bidang Puskesmas kelurahan, bahwa Posyandu adalah milik masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai gotong royong, secara ideologi dan instrumental pada masa kini kurang disadari oleh masyarakat sendiri. Satu hal yang merupakan cenderung menjadi kekurangan negara, adalah sifatnya yang cenderung menyamakan antarmasyarakat.

Negara berharap, dengan menggunakan romantisme masa lalu mengenai gotong royong sebagai model ideal, dapat meningkatkan nilai gotong royong tersebut di kalangan warga masyarakat dan mengukuhkan keyakinan bahwa masyarakat lokal adalah masyarakat yang mandiri, dan, tentu saja bersamaan dengan itu, untuk meningkatkan campur tangan dan pengawasannya terhadap masyarakat lokal. Masyarakat ideal menurut pandangan negara itu didasarkan pada asumsi kesetaraan yang cenderung menafikan karakteristik tiap-tiap masyarakat. “Kota dan negara selalu berubah dan harus dipahami dalam konteks sejarah mnasing-masing. Gambaran-gambaran tentang pedesaan Jawa dan masyarakat ideal karena itu adalah cara negara dan rakyat melihat masa lalu dan masa depan” (Newberry 2013:53).

Maka melalui paragraf ini saya ingin menawarkan istilah, jika dahulu everyday state dapat dimungkinkan karena rakyat bekerja secara gotong royong dan organik mewujudkan diir mereka yang ideal, kini

mungkin *everyday state* itu berubah menjadi *monthly state*. Negara seakan-akan hanya hadir dalam konteks ruang dan waktu tertentu, dalam RW 02 misalnya, negara hanya hadir pada hari Selasa minggu pertama setiap bulannya, yaitu ketika program pelayanan kesehatan untuk balita diadakan. Atau, negara hadir ketika rapat-rapat koordinasi yang dilakukan setiap bulan. Bahkan lebih parahnya, negara hanya hadir ketika diadakan lomba-lomba tertentu.

SIMPULAN

Tampaknya, ideologi ibuisme yang pada masa orde baru terbangun dengan masif, pada konteks masa kini menjadi semakin pudar. Negara tidak bisa dihadirkan sehari-hari jika hanya mengandalkan pada kesukarelaan kaum perempuan dan ibu rumah tangga seperti pada pada masa lalu. Hal ini disebabkan adanya fenomena perubahan yang memunculkan suatu gejala materialisasi dan semakin kompleksnya kebutuhan dan kehidupan sehari-hari, terutama di dunia ibu-ibu. Usaha untuk mewujudkan masyarakat yang ideal, khususnya dalam hal kesehatan, harus memperhatikan dinamika setiap masyarakat sebagai sasaran pembangunan. Para ibu rumah tangga yang menjadi kader Posyandu, meskipun mengaku mau bekerja untuk negara dalam konteks sukarela, sebenarnya dibalik itu mereka mau bekerja salah satunya karena alasan SK dan insentif sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka kepada negara. Hal ini mengisyaratkan adanya repsiprositas atau hubungan timbal balik antara kader Posyandu dan negara. Selain itu, lomba-lomba yang diadakan pemerintah juga menjadi salah satu yang membuat "motor" pengawasan negara terhadap masyarakat lokal dapat terus berjalan.

Daftar Pustaka

Antlov, Hans. 2002. *Negara dalam Desa: Patronase Kepemimpinan Lokal.* Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama

Djajadiningrat-Nieuwenhuis, Madelon. 1987. Ibuism and Priyayization: Path to Power? Dalam Indonesian Women in Focus: Past and Present Notions, diedit oleh Elsbeth Locher-Scholten dan Anke Neihof hal. 43-51. Dordrecht, Belanda: Foris Publication.

Geertz, Hildred. 1961. The Javanese Family. NY: Free Press of Glencoe.

Gibson, Thomas. 1995. Having Your House and Eating It: Houses and Siblings in Ara, South Sulawesi. Dalam About the House: Levi-Strauss and Beyond, diedit oleh Janet Carsten dan Stephen Hugh Jones, hal. 129-148. Cambridge, Inggris: Cambridge University.

Koentjaraningrat. 1961. Some Social-Anthropological Observations on Gotong Royong Practices in Two Villages of Central Java. Diterjemahkan oleh Claire Holt. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Newberry, Jannice. 2013. Back Door Java: Negara, Rumah Tangga, dan Kampung di Keluarga Jawa. Diterjemahkan oleh Bernadetta Esti Sumarah dan Masri Maris. Jakarta, Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sullivan, Nancy. 1983. Indonesian Women in Development: State Theory and Urban Kampung Practice. Dalam Women's Work and Women's Roles: Economic and Everyday Life in Indonesia, Malaysia, and Singapore. Diedit oleh Leonore Manderson, hal. 147-172. Canberra: Development Studies Centre.

Suryakusuma, Julia. 1991. State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in the Indonesian New Order. New Asian Visions 6(2): 46-71

Turner, Victor M. Dan E. M. Burner (Penyunting). 1986. The Anthropology of Experience. Urbana: University of Illionis Press.